

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN TANAH *OVERLAPPING* ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA (PT. KERETA API INDONESIA) DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SURAKARTA**

#### **ABSTRAKSI**

Peran Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sangat dibutuhkan dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan tentang pertanahan di wilayah Indonesia ini. Hal ini mengingat pentingnya sertipikat tanah merupakan sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pemilikan hak tentang pertanahan untuk itu diperlukan dalam menangani permasalahan sengketa pertanahan dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah terhadap pemegang hak atau pemiliknya.

Penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian *overlapping* di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atas tanah Hak Pakai (HP) di Kelurahan Purwodiningratan Surakarta nomor 36 atas nama Pemerintah Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta seluas kurang lebih  $\pm$  9.350 m<sup>2</sup>, dengan Hak Pakai (HP) nomor 23 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (PT. Kereta Api Indonesia) seluas lebih kurang  $\pm$  33.225 m<sup>2</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* (sosiologis) bersifat deskriptif dengan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. data yang digunakan meliputi; wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan;1)Untuk mengetahui menganalisa penyelesaian tanah *overlapping*.2)Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian tanah *overlapping*.3)untuk menganalisa menemukan kepastian hukum akibat *overlapping*.

Banyak kendala dalam penyelesaian tanah *overlapping* dalam penyelesaian tanah Hak Pakai khususnya yang milik instansi pemerintahan terkendala adanya birokrasi pemegang hak.

Upaya dan solusi penyelesaian mediasi tanah *overlapping* oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam hal ini sangat tergantung para pemegang Hak Atas Tanah dalam penyelesaian Kantor Pertanahan sebatas sebagai mediator dalam penyelesaian sesuai peraturan perundangan-undangan.

Kata kunci; *Overlapping*, Sengketa, Pendaftaran tanah, Mediasi

## ABSTRACT

### **RESOLUTION OF OVERLAPPING LAND BETWEEN TRANSPORTATION DEPARTMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (RAILWAY COMPANY PT. API INDONESIA) AND THE CITY GOVERNMENT OF SURAKARTA IN THE OFFICE OF LAND AND SPATIAL PLANNING / NATIONAL LAND AGENCY OF SURAKARTA**

#### **ABSTRACT**

The role of Land And Spatial Planning / Nasional Land Agency is essentially needed to fulfil the need of land service in Indonesia. This is due to the importance of a land certificate as a perfect and valid evidence for ownership of land rights, therefore it is necessary to deal with land disputes in order to ensure legal certainty of land rights to the right holder or owner.

This research is to find out how to resolve overlapping in the Office of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency of Surakarta over the right of usage over land (HP) in Purwodiningratan, Surakarta number 36 on behalf of the city government of Surakarta domiciled in Surakarta with covering area of approximately 9.350 m<sup>2</sup>, and the right of usage over land (HP) number 23 on behalf of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia domiciled in Jakarta (railway company PT. Kreta Api Indonesia) with covering area of approximately 33.225 m<sup>2</sup>.

This research is a descriptive (sociology) empirical juridical research with data source derived from primary data and secondary data. The data includes; interviews, field observation and literature study in the form of books, laws regulations, and documents. The collected data is analyzed qualitatively.

The aim of this study; 1) To know how to analyze the resolution of overlaping land. 2) To find out the obstacles and solutions in resolution of overlaping land. 3) To analyzed the legal certainty due to overlapping land. The are many obstacles in resolving overlapping land and the right of usage over land (HP), especially government owned-land which is contrained by the bureaucracy of right holder.

The effort and solution for the mediation conflict resolution of overlapping land by the Office of the City of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency of Surakarta depends on the right holders over land. The Office of the City of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency of Surakarta acts as a mediator in the resolution process in accordance with the regulation.

Keywords; Overlapping, Dispute, Registration Land, mediation